

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perubahan paradigma masyarakat terhadap pendidikan yang semakin kuat mengarah pada pendidikan sebagai investasi kini telah mengkondisikan semua sektor pendidikan harus menjadi lembaga yang mampu memberikan nilai balik ekonomi yang menguntungkan. Sebuah unit pendidikan harus mampu menjadikan lulusan yang handal berkompetisi, dapat memberikan penguatan secara individual untuk penyebaran ilmu pengetahuan, sehingga lembaga pendidikan harus proaktif dan menjadi lembaga yang efisien dan efektif. Untuk terealisasinya sebuah lembaga pendidikan yang mampu berkompetisi dan mampu menjadi tumpuan investasi masyarakat, maka kehadiran penjaminan mutu pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi sangat penting.

Perbedaan sikap terhadap penyelenggaraan penjaminan mutu karena adanya perbedaan persepsi atas hakikat kualitas itu sendiri, sebab gambaran tentang mutu banyak orang mempunyai kesimpulan yang berbeda bahkan berlawanan. Kualitas seringkali menjadi sulit diukur. Kualitas dianggap sebagai sebuah konsep yang muncul dan terwujud dalam setiap persepsi masing-masing orang. Dalam perspektif manajemen pendidikan, penjaminan mutu memiliki nilai penting yang signifikan karena penjaminan mutu bersifat spesifik dan eksistensinya sangat tergantung pada sistem tempat berlakunya jaminan mutu berada, sehingga dapat berbeda antara perencanaan desain dengan pendekatan yang diterapkan.

Dalam UU No. 20 tahun 2003 bab II pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Di lain pihak dengan diberlakukannya Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berdampak terhadap pengelolaan pendidikan di daerah. Disatu sisi kebijakan otonomi pendidikan sangat berpengaruh positif terhadap berkembangnya sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berbasis kepada kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Keragaman potensi sumberdaya pendidikan di daerah yang ada menyebabkan mutu keluaran sekolah sangat bervariasi. Keberadaan satuan pendidikan baik secara jenjang dan jenis di Indonesia yang tersebar di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keragaman layanan proses, sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, serta mutunya. Oleh karena itu, standarisasi mutu regional dan nasional merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam upaya penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan.

Upaya penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan sulit dilepaskan keterkaitannya dengan manajemen mutu, dimana semua fungsi manajemen yang dijalankan diarahkan semaksimal mungkin dapat memberikan layanan yang sesuai dengan atau melebihi standar nasional pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan upaya untuk mengendalikan mutu (*quality control*). Pengendalian mutu dalam pengelolaan pendidikan tersebut dihadapkan pada kendala keterbatasan sumber daya pendidikan. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya pengendalian mutu dalam bentuk *jaminan atau assurance*, agar semua aspek yang terkait dengan layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah sesuai dengan atau melebihi standar nasional pendidikan. Konsep yang terkait dengan hal ini dalam manajemen mutu dikenal dengan *Quality Assurance* atau penjaminan mutu.

Penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggungjawab satuan pendidikan yang harus didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing serta peran serta masyarakat. Implementasi penjaminan dan

peningkatan mutu pendidikan hingga saat ini masih menghadapi berbagai macam permasalahan antara lain: (1) belum tersosialisasikannya secara utuh Standar Nasional Pendidikan sebagai acuan mutu pendidikan; (2) pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan masih terbatas pada pemantauan komponen mutu di satuan pendidikan; (3) pemetaan mutu masih dalam bentuk pendataan pencapaian mutu pendidikan yang belum terpadu dari berbagai penyelenggara pendidikan; dan (4) tindak lanjut hasil pendataan mutu pendidikan yang belum terkoordinir dari para penyelenggara dan pelaksanaan pendidikan pada berbagai tingkatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diperlukan aspek legal tentang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan meliputi: (1) pengertian dan ruang lingkup penjaminan dan peningkatan mutu; (2) pembagian tugas dan tanggungjawab yang proporsional dalam penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan, (3) pencapaian Standar Nasional Pendidikan, dan (4) pengembangan sistem informasi mutu pendidikan yang efektif untuk pengelolaan, pengambilan keputusan dalam penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan.

Menurut Sistem Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan (SPPMP), penjaminan mutu adalah serentetan proses yang saling berkaitan untuk mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data tentang kinerja dan mutu tenaga kependidikan, program pendidikan dan institusi pendidikan. Penjaminan mutu mengarah pada peningkatan mutu. Proses penjaminan mutu mencakup bidang yang akan dicapai beserta prioritas pengembangan, menyajikan data perencanaan yang didasarkan pada bukti serta pengambilan keputusan, dan mendukung budaya peningkatan yang berkelanjutan. Mutu hasil pendidikan di tingkat pendidikan dasar dan menengah di Indonesia dinilai berdasarkan delapan standar pendidikan nasional BSNP. SPPMP untuk pendidikan dasar dan menengah mencakup: (a) penilaian mutu pendidikan, (b) analisis dan pelaporan mutu pendidikan dan (c) peningkatan mutu pendidikan.

Praktik pelaksanaan kegiatan pada tiga bidang di atas secara efektif akan mengarah pada pengembangan budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan di satuan pendidikan pada tingkat Kabupaten/Kota. Karena tujuan utama SPPMP adalah meningkatkan mutu lulusan, strategi penjaminan mutu SPPMP di tingkat Kabupaten/Kota difokuskan pada Standar Nasional Pendidikan, dengan perhatian utama pada kinerja sekolah, kinerja kepala sekolah, dan kinerja guru. Standar yang menjadi perhatian utama adalah : (1) Standar Isi, (2) Standar Proses belajar mengajar, (3) Standar Kompetensi Lulusan, (4) Standar pendidik dan tenagapendidik, (5) Standar sarana dan prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar pembiayaan pendidikan, dan (8) Standar Penilaian Pendidikan.

SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta merupakan salah satu SD favorit di Surakarta dengan memiliki segudang prestasi, salah satunya juara 1 dalam lomba budaya mutu tingkat Nasional. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengetahui pelaksanaan penjaminan mutu di SD tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penjaminan mutu di SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta.
2. Apa hambatan dalam mengimplementasi penjaminan mutu di SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta.
3. Apa solusi untuk mengatasi hambatan dalam implementasi penjaminan mutu di SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi penjaminan mutu di SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam mengimplementasikan penjaminan mutu di SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta.
3. Untuk mengetahui solusi mengatasi hambatan dalam implementasi penjaminan mutu di SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, di antaranya manfaat secara teoritis dan praktis seperti berikut :

1. Manfaat teoritis :

Manfaat teoritis adalah sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan penjaminan mutu di SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta pada khususnya, maupun bagi masyarakat pada umumnya.

2. Manfaat praktis :

- a. Manfaat bagi siswa, sebagai calon peserta didik pengetahuan dan pengalaman selama mengadakan penelitian ini dapat di transformasikan kepada peserta didik pada khususnya, maupun bagi masyarakat pada umumnya.
- b. Manfaat bagi peneliti, untuk mengetahui lebih dalam penerapan penjaminan mutu di SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta.
- c. Manfaat bagi peneliti lain, sebagai pertimbangan bagi peneliti lainnya yang berminat mengkaji penjaminan mutu di SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta.

- d. Manfaat bagi guru, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam rangka meningkatkan penjaminan mutu di SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta.
- e. Manfaat bagi sekolah lain, bagi sekolah lain dapat menerapkan penjaminan mutu.